

***Policy Capacity* dalam Manajemen Bencana Alam di Indonesia Tahun 2024-2025**

Nely Suwidyanti

Administrasi Publik, Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka, Indonesia
email: nelysuwidyanti@gmail.com

Abstract

Indonesia is a country with a high level of disaster vulnerability due to geological factors, climate change, and the expansion of settlements in disaster-prone areas. These conditions underscore the importance of strengthening policy capacity in disaster management. This study aims to analyze the development of research on policy capacity in natural disaster management in Indonesia during the 2024–2025 period. The study employed a Systematic Literature Review (SLR) method following the PRISMA 2020 guidelines. Articles were searched for via Google Scholar and Scopus using the Publish or Perish application with keywords related to policy capacity, disaster governance, and disaster management. Of the 126 articles identified, 15 met the inclusion criteria and were analyzed thematically. The results indicate that discussions on policy capacity focused on institutional capacity, disaster governance, digital transformation, cross-sectoral collaboration, and challenges in implementing regional policies. The use of digital technology helps strengthen disaster information systems and data-driven mitigation, while participatory approaches enhance community preparedness. The implications of this study highlight the need to strengthen bureaucratic coordination, human resource capacity, and the integration of digital technology to support more adaptive and sustainable disaster management.

Keywords: *Policy capacity, disaster management, disaster governance, disaster mitigation, disaster policy*



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2018 by author.

Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat kerawanan bencana alam tertinggi di dunia. Posisi geografis Indonesia yang berada pada pertemuan lempeng Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik menyebabkan berbagai wilayah rentan terhadap gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, banjir, tanah longsor, hingga cuaca ekstrem. Selain faktor geologis, ancaman bencana di Indonesia juga berkaitan dengan perubahan iklim, kerusakan lingkungan, serta

pertumbuhan kawasan permukiman di daerah rawan bencana. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat lebih dari 3.000 kejadian bencana terjadi sepanjang tahun 2024 dengan dominasi bencana hidrometeorologi seperti banjir, cuaca ekstrem, dan longsor. Sebagian besar kejadian tersebut berdampak pada kerusakan infrastruktur, terganggunya aktivitas ekonomi masyarakat, serta meningkatnya kebutuhan bantuan kemanusiaan di berbagai daerah (Saputra et al., 2025).

Peningkatan kejadian bencana dalam beberapa tahun terakhir turut memengaruhi pola pembangunan nasional dan tata kelola pemerintahan daerah. Curah hujan dengan intensitas tinggi pada awal tahun 2025 menyebabkan banjir dan longsor di sejumlah wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Pada beberapa daerah, bencana juga menyebabkan kerusakan fasilitas pendidikan, jaringan transportasi, lahan pertanian, dan permukiman warga. Kondisi tersebut berkaitan dengan persoalan tata ruang, alih fungsi lahan, sistem drainase, serta rendahnya kapasitas mitigasi di wilayah rawan bencana. Ancaman bencana saat ini berkembang bersamaan dengan meningkatnya kepadatan penduduk dan aktivitas pembangunan pada kawasan yang memiliki tingkat risiko tinggi (Nohrstedt et al., 2024).

Dalam penanggulangan bencana, pemerintah memiliki peran dalam menyusun kebijakan mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi pascabencana. Kapasitas kebijakan atau *policy capacity* berkaitan dengan kemampuan pemerintah dalam mengelola sumber daya, membangun koordinasi antarlembaga, menyusun strategi mitigasi, serta mengambil keputusan pada situasi krisis (Iao-Jørgensen, 2024). Pembahasan mengenai *policy capacity* berkembang dalam kajian administrasi publik karena berkaitan dengan kualitas tata kelola pemerintahan dan implementasi kebijakan publik (Zhong et al., 2024). Pada bidang kebencanaan, kapasitas kebijakan juga berkaitan dengan kemampuan pemerintah membaca risiko bencana, mengelola data kebencanaan, serta menyiapkan langkah penanganan yang sesuai dengan kondisi daerah masing-masing.

Pemerintah Indonesia telah membentuk berbagai regulasi dan kelembagaan kebencanaan melalui BNPB, BPBD, program pengurangan risiko bencana, serta dokumen mitigasi daerah. Namun, kapasitas kebijakan di tingkat daerah masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan koordinasi antarlembaga yang memengaruhi efektivitas penanggulangan bencana (Soetono et al., 2024). Di sisi lain, perkembangan teknologi digital mendorong pemanfaatan sistem informasi kebencanaan, pemetaan digital, aplikasi pelaporan, dan media sosial untuk mendukung mitigasi serta penyebaran informasi darurat. Meski demikian, kesiapan infrastruktur teknologi dan kemampuan teknis aparatur masih belum merata antarwilayah. Penguatan *policy capacity* dalam manajemen bencana bergantung pada banyak aspek, seperti kapasitas kelembagaan, integrasi teknologi, koordinasi lintas sektor, serta keterlibatan masyarakat dalam mendukung tata kelola kebencanaan yang lebih adaptif dan responsif (Choudhury, 2024).

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas kapasitas kebijakan dalam manajemen bencana di Indonesia. Penelitian Iskandar (2025) menunjukkan bahwa kapasitas institusional menjadi faktor paling dominan dalam mendukung efektivitas kebijakan banjir, sedangkan kapasitas politik masih relatif lemah akibat minimnya partisipasi publik dan dukungan lintas periode pemerintahan di Makassar. Sementara itu, Kesuma & Suwaryono (2024) menyoroti evaluasi kebijakan BPBD melalui analisis dokumen perencanaan dan laporan kinerja daerah. Adanya persoalan pada pembaruan dokumen kebencanaan dan keterbatasan sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan pengurangan risiko bencana.

Penelitian lain oleh Kurniaty et al. (2024) menunjukkan bahwa penguatan manajemen bencana juga dipengaruhi oleh tata kelola kolaboratif dan inovasi kebijakan berbasis teknologi. Keberhasilan kesiapsiagaan bencana Gunung Sinabung di Kabupaten Karo ditentukan oleh kualitas *collaborative governance* antara pemerintah, masyarakat, akademisi, sektor swasta, dan organisasi masyarakat. Kolaborasi antarpemangku kepentingan dinilai mampu meningkatkan koordinasi, pertukaran informasi, dan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Sementara itu, Arsynindia & Sejati (2024) menunjukkan bahwa penerapan *smart disaster governance* berbasis analisis geospasial di Kabupaten Pati membantu pemerintah mengidentifikasi wilayah berisiko banjir secara lebih akurat serta mendukung penyusunan kebijakan mitigasi yang lebih adaptif dan berbasis data.

Keempat penelitian tersebut masih membahas kapasitas kebijakan pada ruang lingkup tertentu dan belum mengarah pada pemetaan kajian *policy capacity* dalam manajemen bencana Indonesia secara lebih luas. Pembahasan mengenai perkembangan penelitian *policy capacity* periode 2024–2025 juga masih tersebar pada berbagai tema dan jenis bencana yang berbeda. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memiliki urgensi untuk menganalisis perkembangan kajian *policy capacity* dalam manajemen bencana alam di Indonesia selama periode 2024–2025. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi kecenderungan penelitian, tantangan kapasitas kebijakan, serta arah penguatan manajemen bencana di Indonesia.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) dengan mengacu pada pedoman Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) 2020 yang dikembangkan oleh Page et al. (2021). Pendekatan SLR digunakan untuk mengidentifikasi, mengkaji, dan menganalisis berbagai penelitian terkait *policy capacity* dalam manajemen bencana alam di Indonesia periode 2024–2025. Tahapan penelitian dilakukan secara sistematis melalui proses identifikasi artikel, penyaringan, seleksi kelayakan, hingga penentuan artikel akhir yang sesuai dengan fokus penelitian.

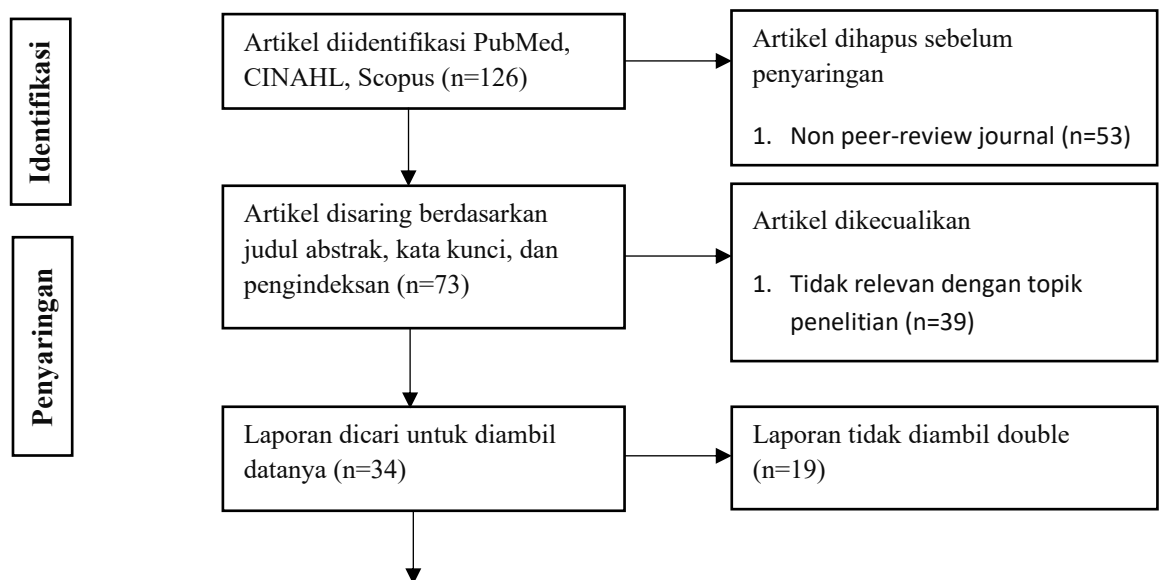
Pencarian literatur dilakukan menggunakan aplikasi Harzing's Publish or Perish (PoP) dengan basis data Google Scholar dan Scopus. Strategi pencarian dilakukan menggunakan kombinasi kata kunci dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, yaitu "policy capacity", "manajemen bencana", "disaster management", "disaster governance", "kapasitas kebijakan kebencanaan", "penanggulangan bencana di Indonesia", dan "disaster risk reduction policy". Penelusuran artikel dilakukan pada publikasi tahun 2024–2025. Proses penelusuran awal menghasilkan 126 artikel yang berkaitan dengan topik penelitian. Selanjutnya dilakukan proses seleksi berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum pada Tabel 1.

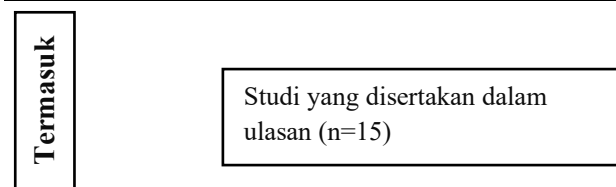
Tabel 1. Kriteria Inklusi dan Eksklusi

Kriteria Inklusi	Kriteria Eksklusi
Artikel diterbitkan pada tahun 2024–2025	Artikel diterbitkan sebelum tahun 2024
Artikel berasal dari jurnal ilmiah nasional atau internasional	Artikel berasal dari sumber non-ilmiah
Artikel membahas policy capacity, disaster governance, atau manajemen bencana	Artikel tidak berkaitan dengan kebijakan kebencanaan
Artikel ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris	Artikel ditulis dalam bahasa selain Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris
Artikel tersedia dalam bentuk full-text	Artikel hanya tersedia dalam abstrak atau preview
Artikel berupa penelitian empiris atau kajian ilmiah terkait kebijakan kebencanaan	Artikel berupa opini, editorial, atau komentar singkat

Sumber : Olahan Data Peneliti 2026

Berdasarkan hasil seleksi akhir, diperoleh 15 artikel yang digunakan sebagai sumber utama. Proses pemilihan dan penyaringan artikel divisualisasikan melalui Diagram PRISMA sebagaimana disajikan pada Gambar.





Gambar 1. Diagram PRISMA

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelaahan literatur yang telah dilakukan, pembahasan mengenai policy capacity dalam manajemen bencana alam di Indonesia periode 2024–2025 terbagi ke dalam beberapa fokus utama, yaitu:

- 1) penguatan pendanaan serta tata kelola pengurangan risiko bencana.
- 2) kapasitas institusional dan tata kelola kebencanaan,
- 3) pemanfaatan teknologi digital dan sistem informasi kebencanaan,
- 4) kolaborasi lintas sektor dan partisipasi masyarakat, serta
- 5) tantangan implementasi kebijakan dan pengurangan risiko bencana.

Sebagian besar artikel membahas persoalan implementasi kebijakan kebencanaan pada tingkat daerah yang berkaitan dengan sumber daya manusia, koordinasi antarlembaga, pengelolaan informasi kebencanaan, dan kesiapan institusi dalam menghadapi situasi darurat.

1) Kapasitas Institusional dan Tata Kelola Kebencanaan

Tabel 2. Kapasitas Institusional dan Tata Kelola Kebencanaan

Temuan Utama	Sumber
Kapasitas institusional menjadi faktor dominan dalam efektivitas kebijakan penanggulangan banjir daerah	Iskandar (2025)
Koordinasi antarinstansi masih mengalami hambatan akibat perbedaan prosedur dan kewenangan	Kesuma & Suwaryono (2024)
Pemerintah daerah memerlukan penguatan analytical capacity dalam membaca risiko bencana	Alhadi et al. (2026)
Adaptive governance membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan kesiapsiagaan kebencanaan	Triwibowo et al. (2024)
Tata kelola kebencanaan membutuhkan hubungan kolaboratif antara pemerintah pusat dan daerah	Ekha et al. (2025)
Policy capacity dipengaruhi oleh kualitas kepemimpinan birokrasi dan kesiapan kelembagaan daerah	Iskandar (2025)

Sumber : Olahan Data Peneliti 2026

Hasil penelaahan menunjukkan bahwa sebagian besar penelitian menempatkan kapasitas kelembagaan sebagai unsur utama dalam keberhasilan manajemen bencana. Kapasitas tersebut berkaitan dengan kemampuan

pemerintah dalam menyusun kebijakan, mengelola koordinasi lintas lembaga, serta melakukan respons cepat pada situasi darurat.

2) Pemanfaatan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Kebencanaan

Tabel 3. Pemanfaatan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Kebencanaan

Pemanfaatan Teknologi Digital	Sumber
Penggunaan aplikasi multiplatform membantu mitigasi bencana geologi	Rachman et al. (2025)
Sistem informasi kebencanaan mempercepat distribusi informasi darurat	Apsari (2025)
Media digital mendukung penyebaran informasi cuaca ekstrem dan jalur evakuasi	Ekha et al. (2025)
Digital governance membantu proses pemetaan wilayah rawan bencana	Alhadi et al. (2026)
Penggunaan data spasial dan flood resilience index membantu identifikasi tingkat kerentanan wilayah	Hassan et al. (2025)
Kesiapan infrastruktur digital masih berbeda antarwilayah di Indonesia	Prasetyo et al. (2024)

Sumber : Olahan Data Peneliti 2026

Berdasarkan hasil penelaahan artikel, teknologi digital mulai menjadi bagian penting dalam penguatan kapasitas kebijakan kebencanaan di Indonesia. Pemanfaatan aplikasi kebencanaan, sistem informasi geografis, serta media komunikasi digital membantu pemerintah dalam mempercepat mitigasi dan respons bencana. Namun, beberapa penelitian menunjukkan adanya kesenjangan infrastruktur digital pada daerah terpencil dan wilayah dengan akses internet terbatas.

3) Kolaborasi Lintas Sektor dan Partisipasi Masyarakat

Tabel 4. Kolaborasi Lintas Sektor dan Partisipasi Masyarakat

Kolaborasi dan Partisipasi	Sumber
Pelibatan masyarakat lokal meningkatkan efektivitas mitigasi bencana	Rachman et al. (2025)
Kolaborasi pemerintah, relawan, dan organisasi sosial memperkuat respons darurat	Apsari (2025)
Community-based disaster management membantu peningkatan kesiapsiagaan masyarakat	Ekha et al. (2025)
Desa tangguh bencana menjadi bentuk penguatan kapasitas masyarakat lokal	Alhadi et al. (2026)
Knowledge co-production membantu integrasi pengetahuan lokal dan kebijakan pemerintah	Hassan et al. (2025)
Keterlibatan masyarakat memperkuat legitimasi kebijakan kebencanaan daerah	Prasetyo et al. (2024)

Sumber : Olahan Data Peneliti 2026

Berdasarkan artikel-artikel di atas, hasil kajian menunjukkan bahwa manajemen bencana tidak hanya bergantung pada kapasitas pemerintah. Manajemen tersebut juga dipengaruhi oleh keterlibatan masyarakat dan organisasi lokal. Pendekatan partisipatif dinilai membantu peningkatan kesiapsiagaan masyarakat serta mempercepat proses mitigasi dan evakuasi ketika terjadi bencana.

4) Tantangan Implementasi Kebijakan dan Pengurangan Risiko Bencana

Tabel 5. Tantangan Implementasi Kebijakan dan Pengurangan Risiko Bencana

Tantangan Implementasi Kebijakan	Sumber
Keterbatasan sumber daya manusia pada BPBD daerah	Iskandar (2025)
Rendahnya kapasitas politik memengaruhi keberlanjutan kebijakan kebencanaan	Kesuma & Suwaryono (2024)
Kolusi politik dan kepentingan bisnis memengaruhi tata kelola banjir	Alhadi et al. (2026)
Implementasi kebijakan tsunami masih mengalami gap antara regulasi dan praktik lapangan	Triwibowo et al. (2024)
Ketimpangan kapasitas fiskal daerah memengaruhi kesiapan mitigasi	Ekha et al. (2025)
Keterbatasan data dan pembaruan dokumen kebencanaan menghambat efektivitas kebijakan	Iskandar (2025)

Sumber : Olahan Data Peneliti 2026

Berdasarkan hasil penelaahan, tantangan terbesar dalam manajemen bencana di Indonesia masih berkaitan dengan kapasitas sumber daya manusia, koordinasi birokrasi, kesiapan anggaran, dan implementasi kebijakan di tingkat daerah. Selain itu, beberapa penelitian menyoroti adanya persoalan tata kelola dan kepentingan politik yang memengaruhi efektivitas kebijakan pengurangan risiko bencana.

Pembahasan

Penguatan Kapasitas Institusional dan Tata Kelola Kebencanaan dalam Manajemen Bencana

Hasil penelaahan literatur menunjukkan bahwa kapasitas institusional menjadi salah satu faktor yang paling berpengaruh dalam mendukung efektivitas manajemen bencana di Indonesia. Kapasitas tersebut berkaitan dengan kemampuan organisasi pemerintah dalam merumuskan kebijakan, mengelola sumber daya, serta mengoordinasikan berbagai aktor yang terlibat dalam penanggulangan bencana. Temuan Iskandar (2025) memperlihatkan bahwa kapasitas institusional memiliki peran dominan dalam pengelolaan risiko banjir di tingkat daerah. Selain kapasitas kelembagaan, kemampuan analitis pemerintah daerah juga menjadi bagian krusial dalam penguatan policy capacity.

Hasil kajian Alhadi et al. (2026) menunjukkan bahwa pemerintah daerah memerlukan analytical capacity yang memadai untuk mengidentifikasi tingkat

kerentanan wilayah, memetakan risiko bencana, dan menentukan prioritas kebijakan mitigasi. Kemampuan tersebut menjadi semakin diperlukan karena karakteristik ancaman bencana di Indonesia sangat beragam dan berbeda pada setiap wilayah. Keterbatasan sumber daya manusia, penguasaan data kebencanaan, serta kemampuan teknis dalam melakukan analisis risiko masih menjadi kendala yang memengaruhi kualitas pengambilan keputusan pada sektor kebencanaan.

Penguatan kapasitas institusional juga berkaitan dengan tata kelola kebencanaan yang mampu beradaptasi terhadap perubahan kondisi lingkungan dan risiko bencana. Triwibowo et al. (2024) menjelaskan bahwa pendekatan *adaptive governance* membantu pemerintah daerah meningkatkan kesiapsiagaan melalui koordinasi yang lebih fleksibel dan responsif. Pendekatan ini mendorong pemerintah untuk tidak hanya berfokus pada penanganan bencana setelah kejadian berlangsung, tetapi juga pada upaya mitigasi dan pengurangan risiko secara berkelanjutan. Dalam praktiknya, *adaptive governance* membutuhkan hubungan kerja yang kuat antarorganisasi serta dukungan sistem koordinasi yang mampu menyesuaikan kebijakan dengan dinamika kondisi lapangan.

Pada saat yang sama, tata kelola kebencanaan yang efektif memerlukan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hasil penelitian Kesuma & Suwaryono (2024) menunjukkan bahwa perbedaan prosedur, kewenangan, serta kapasitas organisasi masih menjadi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan kebencanaan. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Ekha et al. (2025) yang menekankan perlunya hubungan kolaboratif antarpemerintah dalam mendukung efektivitas pengurangan risiko bencana.

Transformasi Digital dan Sistem Informasi Kebencanaan dalam Penguatan Policy Capacity

Perkembangan teknologi digital memberikan pengaruh yang semakin besar terhadap pengelolaan bencana di Indonesia. Hasil penelaahan menunjukkan bahwa berbagai pemerintah daerah mulai memanfaatkan aplikasi kebencanaan, sistem informasi geografis, dan platform digital untuk mendukung proses mitigasi, kesiapsiagaan, serta tanggap darurat. Rachman et al. (2025) menjelaskan bahwa penggunaan aplikasi multiplatform membantu proses identifikasi wilayah rawan bencana dan mempercepat penyampaian informasi kepada masyarakat. Pemanfaatan teknologi tersebut mendukung pemerintah dalam memperoleh data yang lebih cepat sehingga keputusan yang diambil dapat menyesuaikan kondisi yang terjadi di lapangan. Sistem informasi kebencanaan juga berperan dalam memperkuat arus komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.

Apsari (2025) menunjukkan bahwa pemanfaatan sistem informasi digital membantu penyebaran informasi mengenai cuaca ekstrem, jalur evakuasi, lokasi pengungsian, dan kondisi wilayah terdampak secara lebih efisien. Kehadiran media sosial dan aplikasi komunikasi turut memperluas jangkauan informasi

kebencanaan sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi yang diperlukan dalam waktu yang lebih singkat. Pemanfaatan teknologi juga berkembang pada aspek analisis risiko dan pemetaan kerentanan wilayah. Hassan et al. (2025) menjelaskan bahwa penggunaan data spasial dan flood resilience index membantu pemerintah dalam mengidentifikasi kawasan yang memiliki tingkat risiko lebih tinggi. Informasi tersebut dapat digunakan sebagai dasar dalam menentukan prioritas mitigasi, alokasi sumber daya, dan penyusunan program pengurangan risiko bencana.

Pengambilan keputusan yang didukung oleh data memberikan peluang bagi pemerintah untuk menghasilkan kebijakan yang lebih terarah sesuai karakteristik wilayah masing-masing. Meskipun demikian, transformasi digital dalam manajemen bencana masih menghadapi sejumlah tantangan. Prasetyo et al. (2024) menemukan adanya perbedaan kesiapan infrastruktur digital antarwilayah, terutama pada daerah yang memiliki keterbatasan akses internet dan sarana komunikasi. Perbedaan tersebut memengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan berbagai inovasi teknologi kebencanaan.

Kolaborasi Lintas Sektor dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengurangan Risiko Bencana

Hasil kajian menunjukkan bahwa pengurangan risiko bencana memerlukan keterlibatan berbagai pihak yang melampaui peran pemerintah semata. Kompleksitas persoalan kebencanaan menuntut adanya kerja sama antara pemerintah, masyarakat, organisasi sosial, relawan, akademisi, dan sektor swasta. Rachman et al. (2025) menjelaskan bahwa pelibatan masyarakat lokal memberikan kontribusi terhadap efektivitas mitigasi bencana karena masyarakat memiliki pengetahuan mengenai karakteristik lingkungan serta pengalaman menghadapi ancaman yang berkembang di wilayahnya.

Kolaborasi lintas sektor juga berperan dalam memperkuat respons pada situasi darurat. Apsari (2025) menunjukkan bahwa koordinasi antara pemerintah, relawan, dan organisasi sosial membantu mempercepat distribusi bantuan serta pelayanan kepada masyarakat terdampak. Dukungan dari berbagai pihak memungkinkan proses penanganan bencana berjalan lebih terorganisasi, terutama ketika pemerintah daerah menghadapi keterbatasan sumber daya. Pola kerja sama tersebut menunjukkan bahwa kapasitas kebijakan dalam manajemen bencana berkaitan erat dengan kemampuan membangun jejaring dan kemitraan yang berkelanjutan.

Pada tingkat masyarakat, pendekatan berbasis komunitas berkembang sebagai salah satu strategi penguatan kesiapsiagaan bencana. Ekha et al. (2025) menjelaskan bahwa community-based disaster management mendorong masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam kegiatan mitigasi dan kesiapsiagaan. Program desa tangguh bencana yang dibahas oleh Alhadi et al. (2026) menjadi contoh upaya penguatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan, simulasi evakuasi, dan pembentukan kelompok siaga bencana. Keterlibatan

masyarakat dalam berbagai kegiatan tersebut membantu meningkatkan kemampuan menghadapi situasi darurat secara mandiri.

Kolaborasi yang efektif juga memerlukan integrasi antara pengetahuan lokal dan kebijakan pemerintah. Hassan et al. (2025) menjelaskan bahwa knowledge co-production membantu menghubungkan pengalaman masyarakat dengan proses perumusan kebijakan kebencanaan. Pendekatan ini menghasilkan kebijakan yang lebih sesuai dengan kondisi sosial dan lingkungan setempat. Hasil kajian menunjukkan bahwa penguatan policy capacity dapat dicapai melalui hubungan kolaboratif yang mendorong partisipasi masyarakat serta memperkuat kepercayaan antara pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan.

Tantangan Implementasi Kebijakan dan Pengurangan Risiko Bencana di Indonesia

Meskipun berbagai kebijakan dan program kebencanaan telah dikembangkan, implementasinya masih menghadapi sejumlah hambatan pada tingkat daerah. Hasil penelaahan menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia menjadi salah satu persoalan yang paling sering ditemukan dalam berbagai penelitian. Iskandar (2025) menjelaskan bahwa kemampuan aparaturnya pada lembaga penanggulangan bencana daerah masih memerlukan penguatan, terutama dalam aspek perencanaan, koordinasi, dan pengelolaan risiko bencana. Keterbatasan tersebut berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan program mitigasi maupun respons ketika terjadi bencana.

Aspek politik juga menjadi faktor yang memengaruhi keberlanjutan kebijakan kebencanaan. Kesuma & Suwaryono (2024) menunjukkan bahwa kapasitas politik yang rendah dapat menghambat konsistensi pelaksanaan program pengurangan risiko bencana. Kondisi tersebut berkaitan dengan perubahan prioritas pembangunan, dinamika kepemimpinan daerah, serta tingkat dukungan terhadap agenda kebencanaan. Alhadi et al. (2026) menambahkan bahwa kepentingan politik dan ekonomi pada beberapa kasus turut memengaruhi proses tata kelola bencana sehingga pelaksanaan kebijakan tidak selalu berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan.

Hambatan lain berkaitan dengan kesenjangan antara regulasi dan pelaksanaan di lapangan. Triwibowo et al. (2024) menemukan bahwa implementasi kebijakan mitigasi tsunami masih menghadapi berbagai kendala pada tahap operasional. Persoalan tersebut mencakup kesiapan institusi, koordinasi pelaksana, serta kemampuan menerjemahkan kebijakan ke dalam tindakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, ketimpangan kapasitas fiskal dan keterbatasan data kebencanaan masih menjadi tantangan yang memengaruhi efektivitas pengurangan risiko bencana.

Ekha et al. (2025) menunjukkan bahwa kemampuan pendanaan daerah yang berbeda-beda berpengaruh terhadap kesiapan mitigasi dan penyediaan sarana pendukung kebencanaan. Pada saat yang sama, Iskandar (2025) menyoroti bahwa pembaruan data dan dokumen kebencanaan yang belum

optimal dapat mengurangi ketepatan pengambilan keputusan. Oleh karena itu, penguatan policy capacity pada masa mendatang perlu diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan dukungan fiskal, perbaikan sistem data, serta konsistensi implementasi kebijakan di seluruh tingkatan pemerintahan.

Kesimpulan

Policy capacity dalam manajemen bencana alam di Indonesia periode 2024–2025 masih menghadapi berbagai tantangan pada aspek kelembagaan, koordinasi birokrasi, kesiapan sumber daya manusia, serta implementasi kebijakan di tingkat daerah. Kapasitas institusional menjadi faktor utama dalam menentukan efektivitas mitigasi, tanggap darurat, dan pengurangan risiko bencana. Perkembangan teknologi digital turut membantu penguatan sistem informasi kebencanaan, pemetaan risiko, dan penyebaran informasi darurat kepada masyarakat. Selain itu, pendekatan kolaboratif melalui pelibatan masyarakat, relawan, dan organisasi lokal mulai berkembang sebagai bagian dari penguatan kesiapsiagaan bencana berbasis komunitas. Namun, ketimpangan kapasitas fiskal daerah, keterbatasan infrastruktur digital, serta lemahnya sinkronisasi antarlembaga masih menjadi hambatan dalam penguatan tata kelola kebencanaan di Indonesia.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas kajian mengenai policy capacity pada berbagai jenis bencana dan wilayah rawan bencana di Indonesia agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kesiapan daerah dalam menghadapi situasi darurat. Pemerintah pusat dan daerah juga perlu memperkuat kapasitas sumber daya manusia, sistem koordinasi lintas sektor, serta pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan informasi kebencanaan. Pengembangan sistem mitigasi berbasis data spasial dan integrasi pengetahuan lokal masyarakat dapat menjadi bagian dari strategi pengurangan risiko bencana yang lebih adaptif. Selain itu, penguatan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, akademisi, dan organisasi sosial diperlukan untuk menciptakan tata kelola kebencanaan yang lebih responsif dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Alhadi, Z., Permana, I., Putera, R. E., Eriyanti, F., Yusran, R., & Hidayat, R. (2026). Policy Capacity and Local Disaster Management Effectiveness : Assessing Institutional Performance in Rokan Hulu Regency , Indonesia. *International Journal of Safety and Security Engineering*, 16(1), 29–42.
- Apsari, N. (2025). Transformasi Kebijakan Publik Pasca Bencana : Studi Kasus Kecamatan Katanga Kota Palu. *Transgenera: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Humaniora*, 2, 152–163.

Arsynindia, L. D., & Sejati, A. W. (2024). Smart Disaster Governance in Reducing Flood Disaster Risk in Pati Regency based on Geospatial Analysis. *The Indonesian Journal of Planning and Development*, 9(2), 97–103.

Choudhury, M. (2024). Disaster management policy changes in Bangladesh : Drivers and factors of a shift from reactive to proactive approach. *Environmental Policy and Governance*, February 2023, 445–462. <https://doi.org/10.1002/eet.2094>

Ekha, R., Teguh, A., & Lenggogeni, S. (2025). Tourism disaster management dilemmas : Insights from Mandalika, Indonesia. *Social Sciences & Humanities Open*, 11(January), 101400. <https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2025.101400>

Hassan, B., Maulana, A., Idris, M., & Yamin, M. (2025). Policy Capacity Based on Disaster Mitigation in West Sulawesi. *KnE Social Sciences*, 2020, 612–637. <https://doi.org/10.18502/kss.v10i18.19489>

Iao-Jørgensen, J. (2024). Networking in action : Taking collaborative capacity development seriously for disaster risk management. *Progress in Disaster Science*, 21(January). <https://doi.org/10.1016/j.pdisas.2024.100311>

Iskandar, D. (2025). Capacity Gaps in Local Flood Risk Governance : Policy Challenges in the City of Makassar. *Jurnal Administrare: Jurnal Pemikiran Ilmiah Dan Pendidikan Administrasi Perkantoran*, 12(1), 71–78.

Kesuma, A. A., & Suwaryono, I. L. (2024). Evaluasi Kebijakan BPBD Kabupaten Pangandaran dalam Upaya Pengurangan Risiko Bencana di Kabupaten Pangandaran. *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik (JAKP)*, 9(1), 23–45.

Kurniaty, E. Y., Effendy, K., Kawuryan, M. W., & Kurniawati, L. (2024). Collaborative Governance dalam Kesiapsiagaan Bencana Gunung Sinabung di Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara. *PERSPEKTIF*, 13(2), 540–551.

Nohrstedt, D., Parker, C. F., & Parker, C. F. (2024). Revisiting the role of disasters in climate policy- making Revisiting the role of disasters in climate policy-making. *Climate Policy*, 3062. <https://doi.org/10.1080/14693062.2024.2301781>

Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hróbjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-Wilson, E., McDonald, S., ... Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *The BMJ*, 372(1), 1–9. <https://doi.org/10.1136/bmj.n71>

Prasetyo, A., Sumarno, S., Jayaputra, A., Benedictus, M., Murni, R., Nainggolan, T., Purwasantana, D., Miftah, M., Mudis, M., & Wibowo, A. M. (2024). Critical communication of disaster preparedness areas for informational strategies in

disaster management in Indonesia. *Progress in Disaster Science*, 24(August), 100368. <https://doi.org/10.1016/j.pdisas.2024.100368>

Rachman, M. G., Zelvany, Z. T., Favali, F. E., Reyfangga, M., & Putra, A. (2025). Analisis Risiko Kebencanaan Indonesia untuk Mendukung Kebijakan Publik. *Journal of Infrastructure Policy and Management*, 8(1), 85–96. <https://doi.org/10.35166/jipm.v8i1.99>

Saputra, N., Putera, R. E., & Zetra, A. (2025). Innovative capacity building strategies for sustainable disaster risk management: a systematic review, conceptual framework, and future research directions. *E3S Web of Conferences*, 03004.

Soetono, B., Barokah, A. S., Samudra, A. A., & Satispi, E. (2024). Analysis of strengthening disaster risk financing within the framework of disaster management policy in Indonesia. *Journal of Infrastructure, Policy and Development*, 8(9), 1–18.

Triwibowo, R. D., Kurniawan, F., & Wisudha, M. T. (2024). Implementasi E-Government pada Mitigasi Bencana Geologi melalui Multiplatform Application for Geohazard Mitigation and Assesment Indonesia. *PUBLIKAUMA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik UMA*, 12(2), 156–166.

Zhong, D., Lu, Q., Zhang, Y., Li, J., & Lei, T. (2024). International Journal of Disaster Risk Reduction How a poverty alleviation policy affected comprehensive disaster risk reduction capacity: Evidence from China ' s great western development policy. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 111(July), 104656. <https://doi.org/10.1016/j.ijdr.2024.104656>